

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auditor pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, sebab masih banyak ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan sehingga dapat merugikan negara. Penyimpangan terhadap keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir sangat marak kita dengar, bahkan dari rilis yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat *Indonesian Corruption Watch (ICW)* besar kerugian negara pada tahun 2013 akibat korupsi sebesar Rp 7,3 triliun dengan 1271 jumlah tersangka kasus korupsi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi Auditor pemerintah yang memiliki peran untuk mencegah tindakan korupsi terhadap keuangan negara (www.antikorupsi.org).

Audit yang dilakukan pada sektor publik berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001 dalam riscawidya.com). Auditor pemerintah bertugas mengaudit organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintahan (Pemda), Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta instansi-instansi terkait dengan penggunaan keuangan Negara. Auditor pemerintah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah.

Auditor eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal ini didukung dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2006 pada bab III pasal 6 ayat 1 tentang tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki peran melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap keuangan negara baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Apabila ditemukan unsur pidana BPK bertugas melakukan pelaporan kepada instansi yang berwenang dengan kurun waktu paling lama 1 bulan setelah ditemukan unsur pidana tersebut (DHendianto;Biro Hukum BPK-RI;11/3/2006).

Auditor internal pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ayu Dewi,

2013). BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok yaitu audit, konsultasi, asistensi, dan evaluasi (Kisnawati, 2012 dalam Ayu Dewi, 2013). Fungsi BPKP ini juga dijelaskan dalam arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Ketika melaksanakan audit, auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Mempertahankan objektivitas auditor akan membuat auditor itu bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor adalah ujung tombak di dalam proses audit atau pemeriksaan hendaknya harus selalu menjaga kualitas audit agar terus mendapat kepercayaan dari para pengguna laporan keuangan yang mereka audit. Penurunan kualitas audit akan berdampak negatif kepada profesi auditor yang menjadi ancaman bagi profesi tersebut dan akhirnya berdampak pada matinya profesi tersebut.

Kualitas audit merupakan suatu *issue* yang kompleks dan menarik untuk diteliti, karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, yang tergantung pada sudut pandang masing-masing (Basuki dan krisna 2006 dalam Dewi 2013). Hal tersebut

yang membuat kualitas audit sulit untuk diukur sehingga hal tersebut menjadi sensitif bagi pelaku audit. Secara umum kualitas audit biasanya dihubungkan dengan kualifikasi independensi, kompetensi, pengalaman kerja, risiko kesalahan, serta Kompleksitas audit.

Penelitian mengenai kualitas audit sangat menarik untuk diteliti baik pada sektor swasta atau pada sektor publik, karena kualitas audit merupakan salah satu gambaran kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang auditor. Penelitian tentang kualitas audit sudah banyak dilakukan, akan tetapi di dalam penelitian tersebut masih ditemukan variabel-variabel yang tidak konsisten hasilnya dari peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Tidak konsistennya variabel-variabel seperti variabel independensi, kompetensi, pengalaman kerja, risiko kesalahan, dan kompleksitas. Variabel-variabel tersebut telah di uji oleh beberapa peneliti namun hasilnya yang di dapatkan berbeda-beda pengaruhnya terhadap kualitas audit antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Ketidakkonsistenan penelitian-penelitian sebelumnya membuat peneliti sekarang menguji kembali beberapa variabel-variabel penelitian yang tidak konsisten dari peneliti-peneliti sebelumnya yang mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian Hayuningrum Dewi Anggraeni tentang "Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit". Dalam penelitian Hayuningrum Dewi Anggraeni hanya menggunakan independensi dan kompetensi saja untuk mengukur pengaruh terhadap kualitas audit yang di uji pada auditor BPK Perwakilan Jawa Tengah. Replikasi penelitian ini ialah untuk membantu melengkapi

penelitian dari Hayuningrum Dewi Anggraeni agar menambah variabel-variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian Hayuningrum Dewi Anggraeni, penelitian saat ini tetap menguji kembali variabel yang diteliti oleh Hayuningrum Dewi Anggraeni sebelumnya, akan tetapi penelitian sekarang menambah beberapa variabel-variabel lain yang tidak konsisten. Variabel-variabel tidak konsisten yang mempengaruhi kualitas audit ialah Independensi, Kompetensi, Pengalaman kerja, Risiko kesalahan, dan Kompleksitas. Variabel tersebutlah yang menjadi variabel Independen untuk menguji kembali pengaruhnya terhadap kualitas audit.

Penelitian sekarang juga mengganti lokasi penelitian sebelumnya di BPK Perwakilan Jawa Tengah ke BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, serta menambahkan institusi auditor pemerintah lainnya yaitu BPKP perwakilan Kalimantan Tengah sebagai populasi dan sampel. Peneliti memilih Kalimantan tengah sebagai tempat penelitian karena penelitian semacam ini masih jarang dilakukan di Kalimantan Tengah sehingga hal ini dapat memberikan informasi atau referensi tambahan dalam hal penelitian kualitas audit serta agar hasil penelitian mengenai kualitas audit sedikit demi sedikit bisa di generalisasikan karena dilakukan pada tempat-tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti memilih lembaga audit pemerintah yaitu BPK dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah karena dalam melaksanakan tugasnya memiliki perbedaan dengan auditor swasta, yang dimana auditor sektor publik melakukan audit guna kepentingan masyarakat atas organisasi publik, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pemerintah khususnya auditor pemerintah perwakilan yang ada di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu judul pada penelitian ini adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS AUDIT PADA AUDITORSEKTOR PUBLIK” (Studi empiris pada Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Kalteng)**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah agar cakupannya tidak meluas, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel yang digunakan dalam mengukur kualitas audit meliputi Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Risiko Kesalahan, dan Kompleksitas.
2. Sampel yang digunakan ialah sampel yang berasal dari populasi auditor yang bekerja pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

3. Apakah Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah Risiko kesalahan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
5. Apakah Kompleksitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menemukan sejauh mana bukti empiris independensi mempengaruhi kualitas audit
2. Untuk menemukan sejauh mana bukti empiris kompetensi mempengaruhi kualitas audit
3. Untuk menemukan sejauh mana bukti empiris pengalaman kerja mempengaruhi kualitas audit
4. Untuk menemukan sejauh mana bukti empiris risiko kesalahan mempengaruhi kualitas audit
5. Untuk menemukan sejauh mana bukti empiris Kompleksitas audit mempengaruhi kualitas audit

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

Bagi BPK dan BPKP

Memberikan bukti empiris kepada BPK dan BPKP mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independensi, kompetensi, pengalaman kerja, risiko kesalahan, dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit.

Bagi Auditor

Sebagai bahan masukan dan motivasi dalam melaksanakan tugas audit agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

Bagi Akademik

Mampu menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kualitas audit, serta mampu menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.